

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Perempuan Kelompok Tani

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Suharto (2005) dalam Afriansyah (2023, hlm 4, 9) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses berkesinambungan yang bertujuan memperkuat posisi kelompok lemah, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan dipandang bukan sekadar serangkaian kegiatan, melainkan sebuah transformasi sosial yang menghasilkan masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Masyarakat yang berdaya adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki penghidupan yang layak, aktif dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan peran kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi upaya strategis untuk membangun kekuatan dari dalam masyarakat agar mampu mengelola perubahan secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Suharto menjelaskan bahwa pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui lima langkah utama (5P), yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Tahap pemungkinan menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat secara optimal. Penguatan berfokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan agar masyarakat mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan diperlukan untuk menjaga kelompok lemah dari tekanan atau eksploitasi kelompok kuat, sehingga tercipta keadilan sosial. Kemudian, penyokongan menekankan pentingnya dukungan dan pendampingan agar masyarakat dapat menjalankan peran sosialnya secara efektif. Terakhir, pemeliharaan memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan dan kondisi sosial yang stabil dalam masyarakat.

Melalui pendekatan ini, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berfokus pada penciptaan masyarakat yang sadar akan potensi dan hak-haknya, serta mampu mengarahkan perubahan sosial yang berpihak pada

kesejahteraan bersama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Geovani, Herwina, dan Novitasari (2021, hlm. 43, 46–48) dalam penelitiannya, upaya meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dengan mengacu pada teori 5P Suharto. Proses ini diwujudkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan praktik, legalitas kelompok, akses informasi yang mudah, hingga dukungan pendanaan dari dinas terkait. Hasilnya, perempuan tidak hanya memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, tetapi juga mampu mengembangkan solidaritas sosial, mengelola lahan pekarangan, serta meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan budidaya dan pengolahan hasil pertanian, sehingga mereka lebih mandiri, produktif, dan berdaya dalam memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

Sedangkan Zimmerman (1995) dalam Wilona dkk., (2024, hlm. 16) menegaskan bahwa pemberdayaan mencakup peningkatan kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya serta memperluas akses mereka terhadap sumber daya yang dibutuhkan.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara historis berakar pada gagasan Paulo Freire tentang pedagogi kritis yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (*critical consciousness*) sebagai dasar pembebasan manusia dari penindasan struktural. Menurut Freire, dalam Abidin (2022, hlm. 5–6)

“pendidikan harus bertujuan untuk melahirkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) di kalangan kaum tertindas. Kesadaran kritis kaum tertindas tidak akan pernah lahir dari pendidikan yang menjadikan peserta didik hanya sebagai ‘bejana kosong’... Sebaliknya, kesadaran kritis timbul dari proses pendidikan di mana pendidik dan peserta didik sama-sama menjadi subjek belajar yang ditengahi oleh dunia”

Gagasan pendidikan yang membebaskan ini kemudian memengaruhi berbagai model pembangunan partisipatif dan intervensi sosial di negara-negara berkembang yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif perubahan sosial.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pemberdayaan

Menurut La Patilaiya dkk. (2022), suatu kegiatan dapat disebut sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat apabila mengandung ciri-ciri tertentu yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif dan kemandirian masyarakat dalam seluruh prosesnya.

- a. Tokoh atau Pemimpin Masyarakat (*Community Leaders*)
Pemberdayaan masyarakat ditandai dengan adanya figur pemimpin baik formal seperti kepala desa dan lurah, maupun informal seperti tokoh adat dan tokoh agama yang menjadi penggerak utama kegiatan sosial. Tokoh-tokoh ini berperan penting dalam membangun kepercayaan, menggerakkan partisipasi, dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pihak luar.
- b. Organisasi Masyarakat (*Community Organization*)
Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan elemen penting dalam proses pemberdayaan. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisasi potensi warga, memperkuat solidaritas sosial, serta memfasilitasi kegiatan kolektif sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat.
- c. Pendanaan Masyarakat (*Community Fund*)
Ciri lain pemberdayaan masyarakat adalah munculnya sistem pendanaan berbasis gotong royong. Sistem ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan kemandirian finansial masyarakat.
- d. Pemanfaatan Sumber Daya dan Material Lokal (*Community Material*)
Pemberdayaan terlihat ketika masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pemanfaatan potensi lokal memperlihatkan kemampuan adaptasi dan kreativitas warga dalam menyelesaikan masalah secara mandiri.
- e. Pengetahuan Masyarakat (*Community Knowledge*)
Peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat menjadi ciri penting pemberdayaan. Melalui kegiatan seperti penyuluhan, lomba edukatif, dan diskusi warga, masyarakat dapat memperluas wawasan sekaligus membangun kesadaran kolektif. Proses ini menciptakan masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman bersama.
- f. Teknologi Tepat Guna (*Community Technology*)
Teknologi sederhana yang lahir dari masyarakat seperti alat penyaring air

dari pasir atau arang, serta metode deteksi dini penyakit berbasis tanda-tanda mudah merupakan wujud nyata kemandirian teknologis. Inovasi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menciptakan solusi lokal yang efektif tanpa bergantung pada bantuan eksternal.

2.1.1.3 Manfaat Pemberdayaan

Manfaat pemberdayaan masyarakat tercermin dari meningkatnya partisipasi, kapasitas, dan rasa memiliki dalam proses pembangunan sosial. La Patilainya dkk. (2022, hlm. 16) menegaskan bahwa ketika masyarakat diberdayakan, individu merasa memiliki kebebasan bertindak dan tanggung jawab terhadap kemajuan lingkungannya. Proses ini menumbuhkan kepercayaan diri serta kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk memecahkan persoalan bersama.

Selain itu, pemberdayaan mendorong inisiatif sosial dan tindakan kolektif, di mana masyarakat mampu menginisiasi gerakan yang berdampak hingga level nasional. Kelompok-kelompok kecil yang terbentuk melalui kegiatan pemberdayaan menjadi ruang pembelajaran sosial yang memperkuat solidaritas, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial masyarakat. Pada akhirnya, pemberdayaan memberikan solusi terhadap masalah sosial, karena masyarakat mampu memobilisasi sumber daya yang ada demi menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

2.1.1.4 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki orientasi utama untuk membangun kemandirian individu dan komunitas agar mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Menurut La Patilainya dkk. (2022, hlm. 9), pemberdayaan bertujuan “membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.” Dalam kerangka ini, pemberdayaan tidak semata menciptakan ketergantungan pada bantuan luar, melainkan mengembangkan potensi internal agar masyarakat dapat berpikir, bertindak, dan mengendalikan kehidupannya sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemandirian yang dimaksud mencakup aspek berpikir, bertindak, dan mengelola keputusan sosial-ekonomi, yang menghasilkan

masyarakat tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan komunitas yang berdaya saing, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan kolektif.

2.1.1.5 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kelompok Tani

Indikator pemberdayaan masyarakat menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan, daya, dan kemandirian dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonominya. Menurut La Patilaya dkk. (2022, hlm. 17), masyarakat yang berdaya adalah mereka yang mampu “mengidentifikasi potensi dan masalah serta menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri.” Artinya, pemberdayaan tidak hanya diukur dari hasil material, tetapi juga dari kapasitas sosial, psikologis, dan partisipatif masyarakat dalam menentukan arah perubahan.

Penulis menambahkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang menjadi tolak ukur keberdayaan, yakni kemampuan mengambil keputusan, tingkat kemandirian, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya untuk keberlanjutan masa depan. Selain itu, dimensi psikologis juga turut berperan penting, ditandai dengan rasa percaya diri dan kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan sosial. Proses pemberdayaan yang berhasil akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengawasi jalannya kebijakan, serta menikmati hasil pembangunan secara adil.

La Patilaya dkk. (2022, hlm. 18) menegaskan bahwa masyarakat yang berdaya tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan menyuarakan aspirasi dan mengelola sumber daya lokalnya. Kemandirian seperti ini merupakan wujud konkret dari keberhasilan proses pemberdayaan, di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar, melainkan mampu berdiri tegak dengan kekuatan sosial dan ekonomi yang dimilikinya.

2.1.2 Program Pertanian Terpadu

2.1.2.1 Sistem Program Pertanian Terpadu

Menurut Suwardike dan Prabawa (2024, hlm. 19), Sistem Pertanian Terpadu (SPT) merupakan pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi pertanian.

Konsep ini menekankan keterpaduan antara subsistem tanaman, ternak, perikanan, pengelolaan limbah organik, serta penerapan praktik konservasi tanah dan air. Integrasi tersebut bukan hanya mampu memaksimalkan produktivitas, tetapi juga meminimalkan risiko degradasi lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah menjadi pupuk organik atau pakan ternak. Dalam implementasinya, Sistem Pertanian Terpadu juga mendorong diversifikasi usaha tani sehingga petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas, melainkan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai sektor pertanian yang saling terhubung. Hal ini menjadikan Sistem Pertanian Terpadu sebagai model pembangunan pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus mampu memperkuat ketahanan pangan lokal maupun global. Dengan demikian, dalam konteks global yang semakin kompleks, Sistem Pertanian Terpadu menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan peningkatan kebutuhan pangan, keterbatasan lahan, serta urgensi menjaga keseimbangan ekosistem melalui pola produksi yang berorientasi pada keberlanjutan.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Sistem Pertanian Terpadu

Menurut Suwardike dan Prabawa (2024, hlm. 20–25), ruang lingkup Sistem Pertanian Terpadu (SPT) mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan untuk mencapai keseimbangan ekologis dan ekonomi. Pertanian tanaman berperan sebagai komponen utama yang diarahkan untuk mengoptimalkan hasil produksi dengan memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya alam. Aspek peternakan menjadi bagian penting dalam sistem ini karena mencakup kegiatan pemeliharaan ternak, pengelolaan limbah, serta penerapan prinsip kesejahteraan hewan. Sementara itu, agroforestri dipahami sebagai pendekatan terpadu yang memadukan tanaman pangan, tanaman tahunan, dan pepohonan dalam satu kesatuan sistem produksi. Pengelolaan limbah juga menjadi unsur penting untuk menekan dampak lingkungan sekaligus memanfaatkan hasil samping pertanian sebagai sumber daya baru. Seluruh kegiatan tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui sistem pertanian yang efisien, ramah lingkungan, dan berkeadilan.

2.1.2.3 Prinsip Dasar Pertanian Terpadu

Prinsip-prinsip dasar dalam Sistem Pertanian Terpadu, sebagaimana dijelaskan oleh Suwardike dan Prabawa (2024, hlm. 26–32), berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya sistem pertanian yang berkelanjutan. Diversifikasi pertanian menjadi prinsip utama yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Siklus nutrisi tertutup menegaskan pentingnya daur ulang unsur hara agar kesuburan tanah terjaga tanpa bergantung pada input eksternal yang berlebihan. Pemanfaatan sumber daya lokal diarahkan untuk memperkuat kemandirian petani dan mendorong adaptasi berbasis potensi daerah. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan sosial juga menjadi fokus utama, mencakup akses terhadap pangan layak, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Keseluruhan prinsip ini berpadu dalam kerangka keberlanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menerapkan prinsip *zero waste* untuk meminimalkan limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

2.1.2.4 Manfaat Sistem Pertanian Terpadu

Suwardike dan Prabawa (2024, hlm. 32–45) menyatakan bahwa penerapan Sistem Pertanian Terpadu memberikan berbagai manfaat strategis, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun masyarakat. Dari segi ekologi, sistem ini menjaga stabilitas daya dukung lingkungan melalui konservasi sumber daya alam, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam aspek ekonomi, SPT mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan, air, dan energi, sekaligus mengoptimalkan diversifikasi hasil pertanian. Secara sosial, sistem ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan, penguatan kedaulatan pangan, serta pengembangan usaha tani yang mandiri dan inklusif. Lebih jauh lagi, SPT mendukung ketahanan pangan nasional dengan menjamin ketersediaan dan akses pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan energi baru terbarukan seperti biogas, biomassa, dan tenaga surya menjadi wujud komitmen terhadap pertanian yang berkelanjutan. Konsep *Food, Feed, Fertilizer, dan Fuel* (4F) menunjukkan sinergi antara produksi

pangan, pakan, pupuk alami, dan energi alternatif yang mendukung efisiensi sekaligus kesejahteraan petani.

2.1.2.5 Komponen Sistem Pertanian Terpadu

Dalam pandangan Suwardike dan Prabawa (2024, hlm. 45), Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System/IFS*) merupakan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan berbagai komponen pertanian seperti tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam satu sistem yang saling mendukung. Tanaman berfungsi tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem melalui peningkatan kesuburan tanah dan pengaturan siklus air. Peternakan berperan dalam memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak serta meningkatkan efisiensi energi dan pendapatan petani. Komponen perikanan memperkuat diversifikasi pangan melalui integrasi dengan pertanian, di mana limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan dan pupuk alami. Kehutanan memberikan kontribusi ekologis melalui praktik agroforestri yang menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi air. Selain itu, pengelolaan limbah diarahkan untuk menghasilkan sumber daya baru seperti kompos, pupuk organik, dan bioenergi yang ramah lingkungan. Fondasi dari keseluruhan sistem ini adalah pengelolaan air dan tanah yang berkelanjutan guna menjaga produktivitas lahan dan keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang.

2.1.3 Hakikat Ketahanan Pangan Keluarga

2.1.3.1 Konsep Ketahanan Pangan

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, definisi ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) (2001) ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Lebih jauh, Purwaningsih (2009 hlm. 3) dalam Rumawas et al., (2021 hlm 6) menegaskan bahwa terdapat empat aspek utama dalam ketahanan pangan yang saling terkait.

- a. Ketersediaan pangan, yang menuntut negara untuk menjamin jumlah, jenis, dan mutu pangan dalam jumlah yang cukup bagi seluruh penduduk. Ketersediaan ini biasanya diukur dari hasil produksi pertanian, cadangan pangan nasional, serta kemampuan logistik dalam mendistribusikan pangan.
- b. Kemandirian pangan, yaitu kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung berlebihan pada impor. Kemandirian ini penting untuk mengantisipasi gejolak global, seperti krisis pangan, perubahan iklim, atau hambatan perdagangan internasional, yang dapat mengganggu pasokan pangan domestik.
- c. Keterjangkauan pangan, yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup tidak serta merta menjamin tercapainya ketahanan pangan apabila harga terlalu tinggi atau pendapatan masyarakat rendah. Oleh karena itu, stabilisasi harga dan kebijakan perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk menjamin keterjangkauan pangan bagi kelompok rentan.
- d. Konsumsi pangan, yang berhubungan dengan pola makan dan kecukupan gizi seimbang. Aspek ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat. Konsumsi yang baik tidak hanya memastikan terpenuhinya energi, tetapi juga kualitas gizi yang mendukung kesehatan, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya dipandang dari sisi produksi, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Rumawas et al., (2021, hlm. 6) menekankan bahwa keempat aspek tersebut saling melengkapi; jika salah satunya lemah, maka ketahanan pangan secara keseluruhan akan terganggu. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek ketersediaan, kemandirian, keterjangkauan, dan konsumsi secara simultan.

2.1.3.2 Lingkup Ketahanan Pangan Keluarga

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) dalam Suryanto, dkk (2023, hlm. 112) menyebut bahwa ketahanan pangan rumah tangga mencakup beberapa subsistem, yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food access*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*), serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalamnya.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya pangan dan gizi dari cakupan negara sampai individu (termasuk rumah tangga) yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, memenuhi kebutuhan gizi, merata, serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya untuk mencapai status gizi normal demi hidup yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut Sundari & Nachrowi (2015, hlm. 122-123) dalam analisis Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) dan ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia, pengelompokan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada tingkat konsumsi kalori semata, tetapi juga memperhatikan aspek proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep *food security* yang didefinisikan oleh FAO sebagai kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dan preferensi makanan guna hidup aktif dan sehat.

a. Tahan pangan

Rumah tangga dalam kategori ini memiliki tingkat kecukupan kalori di atas standar minimum gizi (≥ 2.100 kkal/kapita/hari), serta proporsi pengeluaran untuk pangan relatif rendah dibandingkan total pengeluaran rumah tangga (biasanya $< 60\%$). Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan sekaligus masih memiliki alokasi sumber daya untuk kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan. Kategori ini merepresentasikan rumah tangga dengan

ketahanan pangan yang baik dan relatif stabil, serta paling sedikit bergantung pada program subsidi pangan.

b. Rentan pangan

Pada kategori ini, rumah tangga mungkin masih memiliki kecukupan konsumsi kalori sesuai standar, tetapi harus mengorbankan porsi besar pengeluaran untuk pangan, sehingga sangat sedikit ruang bagi kebutuhan non-pangan. Atau sebaliknya, pengeluaran pangan rendah namun kecukupan kalori marginal (hampir tidak terpenuhi). Rumah tangga rentan pangan sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga beras, penurunan pendapatan, atau gagal panen. Satu kejadian negatif dapat segera mendorong rumah tangga ini jatuh ke kondisi rawan pangan.

c. Kurang pangan

Rumah tangga dalam kategori ini mengonsumsi kalori di bawah kebutuhan minimal meskipun proporsi pengeluaran untuk pangan relatif rendah. Situasi ini biasanya terjadi karena keterbatasan daya beli atau akses terhadap pangan bergizi, serta pola konsumsi yang tidak seimbang (misalnya terlalu bergantung pada satu komoditas pokok). Kondisi kurang pangan dapat berdampak langsung pada status gizi anggota rumah tangga, terutama anak-anak dan ibu hamil, sehingga berisiko menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang.

d. Rawan pangan

Ini adalah kategori paling kritis, di mana rumah tangga mengalami defisit kalori sekaligus memiliki beban pengeluaran pangan yang tinggi terhadap total pengeluaran. Dengan kata lain, meskipun sebagian besar pendapatan rumah tangga habis untuk membeli pangan, kebutuhan kalori minimum tetap tidak tercapai. Kondisi ini menggambarkan kerentanan ekstrem dan rawan gizi buruk, sehingga rumah tangga sangat bergantung pada intervensi program seperti Raskin atau bantuan sosial lain.

Klasifikasi ini penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran program intervensi pangan, seperti distribusi beras bersubsidi, bantuan langsung tunai, maupun program diversifikasi pangan. Selain itu, kategori tersebut juga membantu

perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan akses dan daya beli rumah tangga miskin terhadap pangan, sekaligus memperbaiki kualitas konsumsi agar tidak hanya cukup secara kuantitas (kalori), tetapi juga berkualitas dari sisi gizi

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Haque, Salman, dan Hasan (2024) meneliti keterkaitan antara pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan Bangladesh yang menjadi bagian dari agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 2 (*Zero Hunger*) dan SDG 5 (*Gender Equality*). Penelitian yang dipublikasikan dalam *Sustainable Development* ini menggunakan analisis data panel rumah tangga untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara pemberdayaan perempuan dan keamanan pangan rumah tangga, terutama melalui diversifikasi konsumsi pangan. Semakin besar partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta keterlibatan dalam kegiatan produksi pangan, semakin tinggi pula kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, bergizi, dan beragam. Temuan tersebut menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh kesetaraan gender dan distribusi kekuasaan di dalam rumah tangga.

Mudatsir (2025) melalui penelitiannya yang dipublikasikan dalam *Jurnal Galung Tropika* membahas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dengan pendekatan survei kuantitatif terhadap sejumlah Kelompok Wanita Tani, penelitian ini mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam kelompok tersebut berpengaruh terhadap produktivitas pertanian rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Wanita Tani berkontribusi signifikan terhadap peningkatan adopsi teknologi pertanian terpadu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota, serta penguatan solidaritas sosial antarperempuan. Keberadaan Kelompok Wanita Tani juga terbukti memperkuat daya tahan keluarga terhadap fluktuasi harga pangan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal.

Radita dan Hapsari (2025) menyoroti pentingnya optimalisasi

pemberdayaan kelompok wanita tani melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring hasil sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi tanaman pekarangan meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, mengurangi ketergantungan pada pasar, dan menekan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan pendekatan partisipatif ini terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pencapaian SDG 2 (*Zero Hunger*).

Paul dan Biswas (2023) dalam penelitiannya yang dipublikasikan melalui *ResearchGate Proceedings* mengkaji pemberdayaan perempuan melalui praktik pertanian terpadu berkelanjutan. Dengan menggunakan studi literatur dan analisis praktik lapangan pada usaha pertanian terpadu skala kecil, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi berbagai komoditas pertanian seperti tanaman pangan, ternak, dan perikanan mampu menciptakan efek ganda bagi ketahanan pangan rumah tangga. Sistem pertanian terpadu tidak hanya membuka peluang kewirausahaan bagi perempuan, tetapi juga memperkuat peran ekonomi mereka dalam keluarga. Selain itu, praktik ini meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya lokal, mengurangi limbah, dan menstabilkan pendapatan keluarga, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan dan keberlanjutan ekologi.

Windiasih, Sari, Prastyanti, dan Sulaiman (2023) meneliti partisipasi kelompok wanita tani dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Community Service* ini menggunakan metode studi kasus pada beberapa kelompok wanita tani di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam kelompok tani berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan lokal, distribusi hasil pertanian, dan pengelolaan sumber daya komunitas. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kelembagaan lokal memperkuat jaringan sosial, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap krisis pangan, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan melalui kelompok

tani berkontribusi tidak hanya terhadap ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga terhadap ketahanan pangan komunitas secara luas.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur hubungan yang sistematis dan saling berkaitan antara berbagai komponen yang membentuk proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui program pertanian terpadu dalam upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga. Kerangka ini tidak hanya menjelaskan tahapan kegiatan, tetapi juga menunjukkan bagaimana setiap unsur berkontribusi terhadap keberhasilan program secara menyeluruh.

Pada tahap *input*, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melibatkan unsur-unsur utama yang berperan langsung dalam kegiatan kelompok, yaitu ketua Kelompok Wanita Tani, anggota Kelompok Wanita Tani, pendamping atau penyuluh, serta tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, memberikan dukungan moral maupun teknis, serta menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian terpadu. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak ini juga mencerminkan adanya kolaborasi sosial yang memperkuat legitimasi dan partisipasi dalam kelompok.

Tahap berikutnya adalah proses pemberdayaan yang mengacu pada teori pendekatan 5P Suharto (2005), yang meliputi sosialisasi, pelatihan, advokasi, fasilitasi, dan monitoring. Tahapan ini mencerminkan langkah-langkah sistematis dalam membangun kapasitas, kesadaran, dan kemandirian Kelompok Wanita Tani. Melalui sosialisasi, anggota memahami pentingnya pertanian terpadu sebagai strategi pemenuhan kebutuhan pangan, pelatihan memberikan keterampilan teknis dan manajerial, advokasi berfungsi melindungi serta memperjuangkan kepentingan kelompok, fasilitasi memperkuat akses terhadap sumber daya seperti alat, bibit, dan jaringan serta monitoring memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Hasil dari proses tersebut menghasilkan *output* berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemanfaatan lahan yang lebih optimal, kemampuan pemasaran hasil pertanian, serta peningkatan pendapatan anggota Kelompok Wanita Tani. Kelima aspek ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam kapasitas individu

maupun kolektif kelompok dalam mengelola kegiatan pertanian terpadu secara mandiri dan produktif. Peningkatan ini juga berkontribusi pada terbentuknya pola pikir yang lebih adaptif terhadap inovasi pertanian.

Selanjutnya, *outcome* yang diharapkan dari keseluruhan proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya ketahanan pangan keluarga yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa kegiatan pertanian terpadu tidak hanya berfungsi sebagai sumber tambahan pendapatan, tetapi juga sebagai strategi utama dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, keluarga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar, melainkan mampu memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani sangat ditentukan oleh sinergi antara dukungan input yang memadai, pelaksanaan proses pemberdayaan yang terarah melalui pendekatan 5P, serta hasil nyata berupa peningkatan kapasitas anggota. Keseluruhan rangkaian tersebut pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sistem pertanian di wilayah penelitian.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2025)